



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 31 TAHUN 2026**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PPID-PSDKP/2025 tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Mei 2026  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL  
 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR 31 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL  
 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Sejarah Ditjen PSDKP	Sejarah Ditjen PSKDP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
2.	Visi Misi	Visi Misi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
3.	Tugas dan Fungsi Ditjen PSDKP	Tugas dan Fungsi Ditjen PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
4.	Kedudukan/Alamat	Kedudukan/Alamat	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
5.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
6.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
7.	Laporan Kegiatan (tahunan/bulanan)	Laporan Kegiatan (tahunan/bulanan)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
8.	Data Jumlah dan Sebaran Pokmaswas	Data Jumlah dan Sebaran Pokmaswas	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
9.	Data Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Data Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengendalian Operasi Armada; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
10.	Rencana Strategis	Rencana Strategis	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
11.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
12.	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
13.	Keragaan Sumber Daya Manusia	Data jumlah pegawai, jenis kelamin, sebaran pegawai, dan gambaran umum pelanggaran	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
14.	Kelembagaan Ditjen PSDKP	Kelembagaan Ditjen PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
15.	Keragaan Sarana dan Prasarana Pengawasan	Keragaan Sarana dan Prasarana Pengawasan	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
16.	Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal PSDKP	Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
17.	Perjanjian Kerja Sama Ditjen PSDKP dengan Instansi Terkait	Perjanjian Kerja Sama Ditjen PSDKP dengan Instansi Terkait	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
18.	Prosedur Pelayanan Standar Laik Operasi (SLO)	Prosedur Pelayanan Standar Laik Operasi (SLO)	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
19.	Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
20.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Ditjen PSDKP	Informasi LHKPN Pejabat Ditjen PSDKP yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
21.	Persentase Penyampaian Laporan SPT Pajak Aparatur Sipil Negara Ditjen PSDKP	Informasi jumlah dan persentase yang wajib Laport Pajak	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
22.	Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	Informasi Laporan Keuangan yang telah diaudit berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Barang Milik Negara (BMN)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
23.	Laporan Barang Milik Negara (BMN)	Laporan Barang Milik Negara (BMN)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
24.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
25.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
26.	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
27.	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Ditjen PSDKP	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Ditjen PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
28.	Daftar Informasi Publik Ditjen PSDKP	Daftar Informasi Publik Ditjen PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
29.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran di lingkungan Ditjen PSDKP	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran di lingkungan Ditjen PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
30.	Prosedur Peringatan Dini Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Prosedur Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
31.	Surat Menyurat Pimpinan Ditjen PSDKP	Surat Menyurat Pimpinan Ditjen PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
32.	Agenda Kerja Pimpinan	Agenda Kerja Pimpinan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
33.	Informasi Bencana Alam	Informasi Bencana Alam	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
34.	Informasi Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan	Informasi Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen PSDKP



Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.